

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</i>					
1.1	Indikator 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	9-10%	9-10% ^{a)}	9-10% ^{a)}	100%
1.2	Indikator 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,9%	21,9% ^{c)}	22,85% ^{a)}	104,34%
1.3	Indikator 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,07%	13,17 ^{a)}	100,77%
1.4	Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy	Persentase	60%	60% ^{c)}	21,43%	35,72%
1.5	Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri	Persentase	100%	100% ^{c)}	69,99%	69,99%
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,09% ^{b)}	8,09% ^{b)}	10,49%	77,12%
2.2	Indikator 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Hari	1,6 hari ^{b)}	1,6 hari ^{b) c)}	1,45 hari	110,34%
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Literasi Keuangan	Indeks	60,27	60,27 ^{c)}	60,27 ^{c)}	100%

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	1 dari 4	1	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 ^{c)}	3,43 ^{a)}	110%
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital	Persentase	92%	20%	27,27%	110%

Keterangan:

a) Nilai merupakan proyeksi capaian

b) Target merupakan nilai maksimal

c) Angka target tahunan

d) Indeks literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survei baru dapat diketahui pada akhir tahun

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital pada Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

- 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
- 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB
- 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB
- 1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy
- 1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.

Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)} = \frac{\text{PDB Sektor Ekonomi Digital}}{\text{Total PDB}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 9-10%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.1 sampai dengan triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	9-10%*	9-10%**	100% (Memuaskan)

Keterangan:

*) Angka target tahunan

**) Angka realisasi merupakan proyeksi

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi masih berupa proyeksi karena metode perhitungan ekonomi digital masih dalam proses penyusunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Rapat Koordinasi pembahasan masih terus dilakukan dan apabila melihat proses penyusunan yang pernah dilakukan oleh Australian Bureau of Statistics (ABS), maka diperkirakan penyusunan metodologi dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026.

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis pada Januari 2026, pada tahun 2025 diperoleh nilai realisasi "Digital Payment" sebesar Rp78.563,1 Triliun atau dengan pertumbuhan sebesar 10,8%. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk membantu ekonomi digital ditempuh melalui program-program infrastruktur pembayaran (*retail, wholesale, data*), penguatan industri, pengembangan inovasi, kerja sama internasional, dan pengembangan Rupiah Digital.

Digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel penting untuk kemudahan bertransaksi sehari-hari secara cepat, mudah, dan biaya yang lebih murah, sehingga memperluas ekonomi dan keuangan inklusif untuk rakyat.

Demikian pula digitalisasi sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) perlu terus dikembangkan, termasuk eksperimentasi penerbitan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) dan Aset Keuangan Digital (tokenisasi aset). Kerja sama antarnegara dalam sistem pembayaran digital, termasuk konektivitas infrastruktur pembayaran (ritel dan *wholesale*), perlu terus dijalin dan diperluas.

Selain itu, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB tahun 2025 (target 9-10%) di-*cascading non-direct* dari unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dengan target jumlah volume transaksi *e-commerce* tahunan sebesar 2,5 dan target triwulanan sebesar 0,6 miliar faktur transaksi. Sampai dengan Triwulan I 2026, nilai realisasi sebesar 0,6 miliar faktur transaksi atau mencapai 100% dari target triwulanan sebesar 0,6 miliar faktur transaksi.

Meskipun kontribusi spesifik ekonomi digital terhadap PDB belum dirinci secara resmi, beberapa indikator menunjukkan peran penting sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional pada Triwulan IV 2025 memperlihatkan pertumbuhan tahunan sebesar 5,39% (year-on-year) dan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), mencerminkan stabilitas dan daya tahan ekonomi domestik. Di samping kontribusi sektor tradisional seperti konsumsi rumah tangga dan investasi, ekonomi digital memainkan peran penopang penting.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	Terlaksana	Koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> dengan melakukan diskusi bersama Prof. Babacan dari Australia.
2	Koordinasi pembahasan Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Terlaksana	Koordinasi pembahasan pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB telah dilaksanakan pada 27 Januari 2026 sesuai undangan Nomor PED.04.06/18/D.III.M.EKON.5/0 1/2026; 6 April 2026 sesuai undangan Nomor PED.04.04/38/D.III.M.EKON.5/0 3/2026; 16 April 2026 sesuai undangan Nomor PED.04.04/39/D.III.M.EKON.5/0 4/2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama kementerian/lembaga terkait:

1. Membuat *timeline* target dan rencana kegiatan pembahasan kontribusi

- ekonomi digital terhadap PDB.
2. Melakukan koordinasi insentif dengan K/L terkait terhadap capaian volume transaksi *e-commerce*.
 3. Melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap daftar periksa (checklist) rencana yang telah disusun.
 4. Menghadiri rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-16 tanggal 15 Januari 2026 dan ke-17 tanggal 25-26 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp6.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Ancaman keamanan siber terhadap layanan keuangan digital dan *e-commerce*.
2. Peningkatan penggunaan AI belum diimbangi dengan kesiapan regulasi dan sumber daya manusia.
3. Ketimpangan infrastruktur digital antar wilayah di Indonesia.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti koordinasi rutin dengan K/L dan *stakeholder* terkait:

1. Penguatan regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital.
2. Pelaksanaan AI Innovation Challenge sebagai salah satu bentuk pemanfaatan AI yang positif.
3. Penguatan pelaksanaan Buku Putih Strategi Nasional Pembangunan Ekonomi Digital.

1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- A. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif;
- B. Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam

rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;

C. Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan

D. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Pengukuran kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB bertujuan untuk mengukur kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan perdagangan Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB (\%)} = \frac{\text{Nilai Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 21,9%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.2 sampai dengan triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,9%*	22,85%**	104,34%

Keterangan:

*) Angka target tahunan

**) Angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada tahun 2025

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Triwulan I Tahun 2026 belum diketahui dikarenakan jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Mei 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB pada Tahun 2025 yang telah dirilis pada bulan Januari 2025.

Adapun realisasi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 23,08% dengan nilai ekspor barang dan jasa Rp1.418.948,03 miliar dan nilai pendapatan domestik bruto nasional sebesar Rp6147238,6 miliar. Sedangkan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Triwulan I

Tahun 2025 adalah sebesar 22,21%. Dari proyeksi tersebut, angka Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa pada Triwulan I diperkirakan minimal sebesar 22,85%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 104,34% yang didapat dari persentase realisasi tahun 2025 dibanding dengan target triwulan I 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Evaluasi implementasi kebijakan peningkatan ekspor tahun 2025	Terlaksana	Evaluasi implementasi kebijakan peningkatan ekspor dilaksanakan melalui kegiatan rapat: 1. 21 Januari 2026 (Kemenko Perekonomian) 2. 11 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian)
2	Koordinasi kebijakan <i>high level meeting</i> peningkatan ekspor	Terlaksana	Koordinasi kebijakan <i>high level meeting</i> peningkatan ekspor dilakukan melalui rapat: 1. 7 Januari 2026 (Zoom) 2. 23 Januari 2026 (Zoom) 3. 29 Januari 2026 (Zoom) 4. 3 Februari 2026 (Zoom) 5. 5 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian) 6. 5 Maret 2026 (Bogor) 7. 10 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian) 8. 12 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian)

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain juga telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut Pembelian Komoditas Pangan dari Amerika Serikat sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/1/D.III.M.EKON.3/01/2026.
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan *Dashboard* Monitoring Ekspor dan Impor sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/02/D.III.M.EKON.3/01/2026.
3. Rapat Koordinasi Persiapan Teknis *Third Meeting of China-Indonesia TCTP Joint Working Committee* sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026 dan PED.02.02/04/D.III.M.EKON.3/01/2026.
4. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut implementasi MoU dan Potensi Pembelian Produk Pertanian AS dalam rangka Negosiasi Tarif Resiprokal dan Peluang Kerjasama *Business to Business* (B to B) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat sesuai surat undangan Nomor

PED.02.02/06/D.III.M.EKON.3/02/2026.

5. Rapat Koordinasi Pembahasan Izin Fasilitas KB dan Pemenuhan Kewajiban PT Golden Flower Tbk. sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/07/D.III.M.EKON.3/02/2026.
6. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Peran FTA dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/09/D.III.M.EKON.3/02/2026 dan PED.02.01/10/D.III.M.EKON.3/02/2026.
7. Rapat Koordinasi Pembahasan Progres/Tindak Lanjut Kerja Sama *Two Countries Twin Park* (TCTP) sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/11/D.III.M.EKON.3/03/2026.
8. Rapat Koordinasi Pembahasan Sinkronisasi Kementerian/Lembaga dan Pelaku Usaha Dalam Proses Penyelidikan Anti-Dumping dan CVD Terhadap CSV atau Solar Panel sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/1/D.III.M.EKON.3/01/2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp6.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Konstraksi ekspor antara lain dipengaruhi oleh perlambatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan besi baja, serta berkurangnya hari kerja selama periode libur Idul Fitri.
2. Melemahnya permintaan global.
3. Ketidakpastian kebijakan geopolitik yang memengaruhi perdagangan antar negara mitra.
4. Meningkatnya trade barriers seperti kebijakan antidumping, subsidi domestik, persyaratan teknis untuk melindungi industrinya.
5. Struktur ekspor Indonesia masih didominasi komoditas berbasis sumber daya alam sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperluas ekspor produk manufaktur berteknologi menengah dan tinggi.
2. Penguatan sistem informasi pasar ekspor dan promosi dagang internasional.
3. Penguatan diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar baru.
4. Memperkuat diplomasi perdagangan melalui WTO maupun FTA, mempercepat penyelesaian sengketa dagang, serta meningkatkan fasilitasi ekspor bagi sektor terdampak.
5. Mempercepat hilirisasi industri dan memperkuat insentif investasi industri pengolahan berorientasi ekspor.

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah seperti halnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga, menjaga kelancaran distribusi barang, serta mendukung stabilitas harga. Pada tahun 2025 TW IV, perdagangan besar dan eceran secara nasional berkontribusi 13,22%.

Pengukuran kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB (\%)} = \frac{\text{PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran}}{\text{PDB Nasional}} \times 100\%$$

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 13,07%. Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun. Capaian IKU 1.3 sampai dengan triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,17%*	100,77%

Keterangan: *) Angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada tahun 2025

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran

Triwulan I Tahun 2026 belum diketahui karena jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Mei 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB Triwulan IV Tahun 2025 yang telah dirilis pada awal Januari 2025. Merujuk pada realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 13,24% dan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 13,22%. Dari kedua proyeksi tersebut, angka Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan I tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai 13,17%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 100,77%.

Data yang terdapat pada BPS masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi, Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga validitas dan kredibilitas data, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDB Kategori G1 dan G2 ke BPS, namun data tersebut belum didapat sampai laporan ini disusun.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi tindak lanjut identifikasi isu/permasalahan dalam pencapaian target kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	Koordinasi tindak lanjut identifikasi isu/permasalahan dalam pencapaian target kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha dan kunjungan ke dinas daerah.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Pada awal tahun, beberapa komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga akibat faktor cuaca dan distribusi sehingga memengaruhi pola konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan eceran.
2. Banyaknya produk impor murah di pasar domestik.

3. Perang harga di kanal daring maupun ritel modern menekan margin pelaku usaha, terutama usaha kecil yang memiliki skala ekonomi terbatas.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan koordinasi bantuan pangan pemerintah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
2. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas dan produktivitas, melakukan promosi dan peningkatan daya beli masyarakat melalui Program Belanja Dalam Negeri.
3. Mendorong efisiensi operasional, memperkuat akses pembiayaan UMKM, serta meningkatkan kapasitas manajemen usaha dan inovasi produk.

1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy* digunakan untuk mengukur pelaksanaan inisiasi pengembangan *gig economy* melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi di beberapa lokasi *pilot project*. IKU ini merupakan IKU beru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, maka perlu adanya pematangan konsep program *gig economy* sebelum pelatihan dilaksanakan untuk keberlanjutan program yang lebih baik. Mitra penyedia pelatihan melibatkan perusahaan teknologi (*tech company*), institusi akademik, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam pengembangan talenta ekonomi digital.

Target lokasi *Pilot Project* tahun 2026 terdiri dari 14 kota, yaitu Makassar, Yogyakarta, Bandung, Medan, Banjarmasin, Lombok, Mataram, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Jayapura, dan Tangerang. Kota-kota tersebut dapat menyesuaikan, namun merupakan daerah yang representatif untuk perkembangan *gig economy* di Indonesia, didorong oleh infrastruktur digital tinggi, populasi Gen Z/milenial, serta tingginya pekerja kreatif dan *freelancer*.

Capaian IKU ini mencerminkan persentase penyelesaian inisiasi *gig economy* minimal di 9 kota *pilot project*. Program ini diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia dalam membangun tenaga kerja *gig economy* yang kompeten, adaptif terhadap transformasi digital, serta siap berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendukung penguatan kualitas SDM sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy} = (\text{Realisasi daerah inisiasi Gig Economy} / \text{Target daerah inisiasi Gig Economy}) * 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.4 Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy* Tahun 2026 adalah sebesar 60%. Capaian IKU 1.4 sampai dengan triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy	Persentase	60%*	21,43%	35,72%

Keterangan: *) Angka target tahunan

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi persiapan peluncuran Program Pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project	Terlaksana	Koordinasi persiapan peluncuran Program Pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project terlaksana sesuai undangan nomor KWU.06.01/5/D.III.M.EKON. 1/1/2026 tanggal 5 Januari 2026; PED.04.02/9/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 6 Januari 2026; PED.04.02/20/D.III.M.EKON. 1/01/2026 tanggal 9 Januari 2026; PED.04.02/34/D.III.M.EKON. 1/01/2026 tanggal 19 Januari 2026; PED.04/45/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026; PED.04.02/58/D.III.M.EKON. 1/01/2026 tanggal 26 Januari 2026; PED.04/78/D.III.M.EKON.1/02/2026 tanggal 3 Februari 2026; PED.04.02/100/D.III.M.EKON.1/02/2026 tanggal 18 Februari 2026.
2	Pelaksanaan launching dan pelatihan program Gen Z: Gig Economy & AI Competition di lokasi pilot project	Terlaksana	Pelaksanaan launching dan pelatihan program Gen Z: Gig Economy & AI Competition di lokasi pilot project telah dilakukan di

			Jawa Barat (Kota Bandung), D.I.Yogyakarta, dan DKI Jakarta
--	--	--	--

Realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dengan Google Indonesia, perguruan tinggi, sekolah vokasi, pemerintah daerah, serta berbagai mitra pelaksana.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Belum adanya anggaran khusus dari pemerintah untuk biaya realisasi Program Gig Economy.
2. Belum adanya *databased* pekerja Gig Economy di Indonesia sehingga target kehadiran peserta yang diharapkan belum optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Mengajukan RO dan TOR khusus Gig Economy untuk efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan Gig Economy.
2. Mulai menyusun *databased* pekerja Gig Economy berdasar peserta yang sudah mendaftar.

1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri merupakan IKU baru merupakan IKU baru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berkontribusi terhadap penguatan nilai perdagangan dalam negeri melalui optimalisasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar domestik, penguatan distribusi barang, serta stimulasi konsumsi produk dalam negeri.

Adapun program belanja nasional yang direncanakan untuk terselenggara pada tahun 2026 berjumlah 5 kegiatan yaitu:

1. BINA Lebaran
2. Friday Mubarak
3. BINA Indonesia Great Sale
4. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS)
5. EPIC Sale

Kegiatan akan diselenggarakan oleh asosiasi terkait yaitu HIPPINDO (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APRINDO

(Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), dan idEA (Indonesia, *E-Commerce Association*) dengan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Capaian efektivitas menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor, kesiapan pelaku usaha, serta respons positif masyarakat terhadap kampanye belanja nasional. Dengan demikian, indikator ini berperan penting sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan guna memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri = $\left(\frac{\text{Realisasi nilai transaksi program belanja nasional}}{\text{Target nilai transaksi program belanja nasional yang direncanakan}} \right) \times 100\%$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.5 Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Capaian IKU 1.5 sampai dengan triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri	Persentase	100%*	69,99%	69,99%

Keterangan: *) Angka target tahunan

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri triwulan I	Terlaksana	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Negara triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan surat nomor PED.01.01/01/D.III.M.EKON.2/01/2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan

beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah banyaknya produk impor murah di pasar domestik.

Berdasarkan kendala dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yaitu dengan meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas dan produktivitas, melakukan promosi dan peningkatan daya beli masyarakat melalui Program Belanja Dalam Negeri.

2

Sasaran Program: Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB

Latar Belakang

Biaya transportasi adalah biaya yang mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan inbound atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi. Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.

Biaya transportasi terdiri dari:

- Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel
- Biaya Jasa Penunjang Angkutan
- Biaya Jasa Angkutan Laut
- Biaya Jasa Angkutan Udara
- Biaya Jasa Pos dan Kurir
- Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Jasa Angkutan Rel

Pengukuran biaya transportasi logistik terhadap PDB bertujuan memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB

$$= (\text{Nilai biaya transportasi logistik/nilai PDB}) * 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8,09%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 2.1 sampai dengan triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target* TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,09%**	10,49%	77,12%

Keterangan:

*) Target merupakan nilai maksimal

**) Angka target tahunan

Target biaya transportasi logistik terhadap PDB tahun 2026 adalah 8,09% yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin rendah biaya logistik berarti semakin baik kinerjanya. Realisasi triwulan I didorong oleh penyelesaian RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang berisikan 3 (tiga) strategi yang menyorot pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik.

Biaya transportasi logistik/Biaya Logistik Nasional (BLN) terdiri dari biaya transportasi logistik darat dan laut yang perhitungannya dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan sudah diumumkan secara tertutup pada triwulan IV 2025 untuk BLN 2022 dengan menggunakan basis IO 2016, sedangkan untuk BLN 2023-2024 menggunakan basis IO 2020.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>	Terlaksana	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> telah dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Tindak Lanjut <i>Domestic Working Group</i>

			untuk ASEAN Common Qualification pada Profesi Warehouse Operator dan Freight Forwarder pada tanggal 14 Januari 2026.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

1. Rapat Pembahasan Penyusunan Kualifikasi Profesi *Warehouse Operator* dan *Freight Forwarder* Nasional tanggal 4 dan 10 Februari 2026.
2. *Capacity Building Workshop for the AKFTA Common Occupational Standards Frameworks for Freight Forwarders and Warehouse Controllers* tanggal 6 maret 2026.
3. Rapat Pembahasan *Pending Matters* Rencana Aksi RPerpres Penguatan Logistik Nasional tanggal 25 Februari, 5 Maret, 19 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Tingginya biaya logistik pasca lonjakan distribusi akhir tahun, terutama akibat penyesuaian tarif angkutan umum.
2. Kemacetan di jalur distribusi utama yang mengakibatkan meningkatnya waktu dan biaya pengiriman.
3. Kenaikan harga bahan bakar dan biaya operasional transportasi.
4. Waktu bongkar muat (*dwelling time*) yang masih relatif tinggi di pelabuhan.
5. Lonjakan permintaan distribusi menjelang Ramadhan, mendorong kenaikan tarif logistik.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Optimalisasi perencanaan distribusi dan rute logistik untuk menekan biaya.
2. Koordinasi untuk mengurai *bottleneck* transportasi di titik-titik padat.
3. Penguatan subsidi/insentif logistik untuk wilayah tertentu.
4. Percepatan layanan pelabuhan dan implementasi sistem digital kepelabuhanan.
5. Pengaturan distribusi melalui manajemen permintaan dan jadwal pengiriman.

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Latar Belakang

Waktu perputaran (*Turn Around Time/TAT*) di pelabuhan yang difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

Pelabuhan yang dijadikan sampel perhitungan terdiri dari Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya). Kedua pelabuhan tersebut dipilih karena merupakan pelabuhan tersibuk dan terbesar yang menjadi barometer perekonomian Indonesia.

Pengukuran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan bertujuan memberikan gambaran kinerja pelabuhan dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT)

= (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal

Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok

= Σ Rata-rata TT Seluruh Bulan : 12

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan Tahun 2026 adalah sebesar 1,6 Hari. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029.

Hingga triwulan I tahun 2026, Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan yang telah terealisasi sebesar 1,45 Hari atau mencapai 110,34% dari target tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I*	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Persentase	1,6 Hari	1,45 Hari	110,34%

*) Target merupakan nilai maksimal (satuan hari = 24 jam)

Target rata-rata waktu perputaran di pelabuhan tahun 2026 adalah 1,6 hari yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin cepat waktu perputaran berarti semakin baik kinerjanya. Realisasi triwulan I tahun 2026 adalah 1,45 hari dari target 1,6 hari atau berhasil mencapai kinerja 110,34%.

Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelabuhan dan Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Kebijakan Pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional, serta Kebijakan Penyusunan RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Kemenko Perekonomian menginisiasi pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional dengan asistensi dari Bank Dunia guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi melalui dimensi waktu yang dikembangkan mengikuti kaidah *best practice international* (pendekatan *Supply Chain Tracking Data/Logistic Performance Index*) serta untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang logistik dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional terhadap PDB.

Indikator kinerja logistik internasional yang akan mengikuti indikator dalam perhitungan *Logistics Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia, meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time at Port*; (ii) *Container indicator: Container Dwell Time Import & Export*; (iii) *Container Indicator: Consolidated Dwell Time Import & Export*; (v) *Postal indicator: Postal Delivery Time Import*; (vi) *Airport indicator: Aviation Dwell Time Import*;

Indikator kinerja logistik domestik meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time Domestic*; (ii) *Inter-Island indicator: Container Dwell Time Outbound & Inbound*.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan produktivitas alat bongkar muat di terminal peti kemas pelabuhan	Terlaksana	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan produktivitas alat bongkar muat di terminal peti kemas pelabuhan telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Penyepakatan Definisi dan Ruang Lingkup Rata-Rata Waktu Perputaran Kapal di Pelabuhan (<i>Ship Turn Around Time at Port/TAT</i>) pada tanggal 4 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau

hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Lonjaknya arus barang pasca libur akhir tahun yang menyebabkan antrean kapal dan kontainer meningkat.
2. Keterbatasan kapasitas dermaga dan alat bongkar muat di beberapa pelabuhan utama serta proses administrasi yang masih memakan waktu.
3. Inefisiensi dalam proses *trucking* dan *gate in-gate out* di area pelabuhan.
4. Peningkatan volume barang menjelang Ramadhan, meningkatkan tekanan pada kapasitas pelabuhan sehingga meningkatkan kemacetan di *hinterland* (akses jalan menuju ke pelabuhan) yang memperlambat distribusi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya tindak lanjut:

1. Mengoptimalkan jadwal sandar kapal dan manajemen antrean.
2. Percepatan proses digitalisasi layanan kepelabuhan seperti *single submission* and *e-document*.
3. Digitalisasi sistem *trucking* dan *gate automation* untuk mempercepat arus barang.
4. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengaturan lalu lintas logistik

3

Sasaran Program: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Latar Belakang Keuangan

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Penggunaan akun/layanan keuangan formal adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal. Literasi keuangan yang memadai mendorong meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, serta perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mengukur indeks literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik,

tingkat literasi keuangan nasional pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan 66,64%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2026 adalah sebesar 60,27. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun untuk realisasi capaian Triwulan I 2026, pengukuran capaian Indeks literasi keuangan akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). SNLIK akan diumumkan pada Semester II Tahun 2026, sehingga hasil survei SNLIK baru dapat diketahui pada akhir tahun 2026, maka dari itu ketercapaian target pada Triwulan belum dapat diketahui, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 3.1. Indeks Literasi Keuangan	Indeks	60,27*	60,27**	100%

*) Angka target tahunan

**)Angka merupakan proyeksi (indeks literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II Tahun 2026).

Pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diketahui berapa realisasinya karena indeks literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II Tahun 2026 sehingga hasil survei baru dapat diketahui pada akhir tahun.

Realisasi indeks literasi keuangan tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri, dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi

triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Keuangan			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas	Terlaksana	Koordinasi Awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas: a. Rapat Persiapan Penyusunan Bahan Laporan SNKI Tahun 2025 pada tanggal 6 Januari 2026 (Pokja II, Sekretariat DNKI), 7 Januari 2026 (Pokja I dan III), 9 Januari 2026 (Pokja VI dan VII), 13 Januari 2026 (Pokja IV dan V). b. Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut FGD Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat (PINTAR) dengan OJK pada tanggal 5 Februari 2026. c. Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan "Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan" pada tanggal 2 Maret 2026.
2	Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTREA untuk perkuat literasi dan inklusi keuangan	Terlaksana	Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTREA untuk perkuat literasi dan inklusi keuangan telah dilaksanakan pada 6 Maret 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Komnas Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Adapun upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada tanggal 5 Januari 2026.
2. Bilateral Meeting terkait Persiapan Kegiatan "Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan" dengan Bank Indonesia pada tanggal 2 Februari 2026.
3. Audiensi dan pertukaran pengetahuan antara National Bank of Ethiopia (NBE) dan Financial Service Deepening Ethiopia (FSDE) dengan SDNKI pada tanggal 9 Februari 2026.
4. Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan "Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan" pada tanggal 2 Maret 2026.
5. Audiensi dengan Kemenkum terkait RPP DNKK pada tanggal 3 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara

virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Kesenjangan akses informasi keuangan akibat keterbatasan infrastruktur dan edukasi.
2. Literasi keuangan pada segmen UMKM masih terbatas khususnya dalam pengelolaan keuangan usaha.
3. Masih rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya tindak lanjut:

1. Pelaksanaan kampanye literasi keuangan nasional melalui berbagai kanal (*online* dan *offline*).
2. Menyediakan program pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM seperti pembukuan sederhana dan mengenai *cash flow*.
3. Memberikan edukasi dan sosialisasi produk keuangan syariah.

4

Sasaran Program: Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika perekonomian global, khususnya pada sektor perniagaan dan ekonomi digital, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan melalui proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terintegrasi. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputy Bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

- (1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
- (2) Pengembangan Ekspor Nasional
- (3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
- (4) Pengembangan Ekonomi Digital
- (5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan

kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektivitas SKP

$$= 5 \sqrt{(SKP \text{ AD } 1 \times SKP \text{ AD } 2 \times SKP \text{ AD } 3 \times SKP \text{ AD } 4 \times SKP \text{ AD } 5)}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- A. Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- B. Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- C. Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- D. Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (baik) yang diperoleh dari data setiap Keasdepan dan dihitung berdasar rumus.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi **sebesar 1 dengan capaian penilaian 20,48% atau 100% dari target triwulan I atau 33,33% dari target tahun 2026** dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi TW I	% Kinerja
-------------------------	--------	----------------	-------------	----------------	-----------

IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	1*	100%
--	--------	----------	----------	----	------

Catatan: Nilai belum merupakan indeks akhir, capaian Penilaian Efektivitas SKP sampai triwulan I 2026 adalah 20,48%

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari akar lima dari Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di unit Eselon II: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

No	Unit Kerja Eselon II	Persentase Efektivitas SKP (%)
1	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	20
2	Asisten Deputi Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	20
3	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	20
4	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	22,5
5	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	20
Penilaian Efektivitas SKP sampai dengan Triwulan I		20,48

Pada Triwulan I Tahun 2026, Penilaian Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi adalah 20,48%. Hal ini dikarenakan sebagian besar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang dilaksanakan di unit Eselon II Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital masih berada pada **tahap pertama** yaitu Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait kegiatan peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Terlaksana	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait kegiatan peningkatan ekspor dan pengendalian impor dilaksanakan melalui: a. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Optimalisasi Peran FTA dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/09/D.III.M.EKON.3/02/2026 dan PED.02.01/10/D.III.M.EKON.3/02/2026. b. Penyampaian Surat Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Pengenaan BMAD terhadap Impor Kertas Dupleks asal Korea, Malaysia, dan Taiwan sesuai surat nomor PI.02.03/13/M.EKON/02/2026. c. Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Upaya Penguatan Efektivitas Kebijakan <i>Trade Remedies</i> sesuai nomor undangan PED.02.03/32/D.III.M.EKON/02/2026. d. Penyampaian Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan RPermendag Impor sesuai nomor undangan PED.02.01/35/D.III.M.EKON/02/2026. e. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Kajian Arah Pengembangan Industri TPT sesuai nota dinas nomor PED.02.03/24/D.III.M.EKON/02/2026. f. Penyampaian Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Penyelidikan KADI terkait Pengenaan BMAD terhadap HRC asal Wuhan Iron

			and Steel, Co., Ltd. sesuai surat nomor PI.02.03/22/M.EKON/02/2026.
2	Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	Terlaksana	Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi dilaksanakan melalui: a. Kegiatan Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 tanggal 3 Maret 2026. b. Rapat Koordinasi Persiapan Posisi Indonesia untuk pertemuan ASEAN DEFA putaran ke-16, tanggal 9 Januari 2026. c. Launching Program Penguatan Ekosistem Gig Economy di Bandung tanggal 30 Januari 2026.
3	Koordinasi identifikasi permasalahan terkait peningkatan literasi keuangan	Terlaksana	a. Rapat Pembahasan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada tanggal 5 Januari 2026. b. Rapat Program Kerja Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan Pembahasan Penguatan Program Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (Pokja 1) pada 29 Januari 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor sesuai dengan surat undangan nomor PED.02.02/02/D.III.M.EKON.3/01/2026.
- b. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Teknis Pengembangan *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor tanggal 11 Februari 2026, sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/08/D.III.M.EKON.3/02/2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan antar K/L, sehingga terjadi tumpang tindih program.
2. Penyelesaian isu lintas sektor membutuhkan koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan sehingga memerlukan waktu lebih panjang untuk

mencapai kesepakatan.

3. Perubahan regulasi dan kebijakan sektoral yang cukup dinamis memerlukan penyesuaian koordinasi secara cepat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka telah disusun beberapa upaya tindak lanjut:

1. Melakukan penguatan forum koordinasi lintas K/L secara rutin dan terjadwal.
2. Mengoptimalkan mekanisme debottlenecking melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE), memperkuat koordinasi melalui tim kerja lintas sektor, serta meningkatkan pelibatan dunia usaha dan asosiasi dalam proses perumusan kebijakan.
3. Melakukan harmonisasi regulasi secara berkelanjutan, meningkatkan koordinasi penyusunan regulasi lintas K/L, serta mempercepat penyelesaian isu regulasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan.

5

Sasaran Program: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

$$= (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4}) / 5$$

Catatan:

Nilai Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik). Adapun target triwulan I 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik).

Pada triwulan I tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diproyeksikan dapat mencapai 3,33 atau 110% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
-------------------------	--------	-------------	----------------	-----------

IKU 5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4* (baik)	3,43**	110%
---	--------	---------------------	--------	------

***) Nilai merupakan target triwulan II 2026 karena survei dilaksanakan semesteran

*) Nilai triwulan I merupakan proyeksi capaian

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dilaksanakan setiap semester dan diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di unit: Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan.

Adapun Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

No	Unit Kerja Eselon 2	Indeks Kepuasan
1	Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	3,59 (Puas)
2	Asisten Deputy Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	3 (Puas)
3	Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional	3,35 (Puas)
4	Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital	3,63 (Puas)
5	Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan	3,56 (Puas)
Rata-rata		3,43*

Pada triwulan I tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital belum dilaksanakan namun berdasar proyeksi triwulan IV tahun 2025 sebesar 3,43 maka pada triwulan selanjutnya dapat diperoleh nilai rata-rata indeks minimal 3,43 (Puas) dan telah diarahkan bahwa survei akan dilaksanakan melalui *form* daring.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilaksanakan melalui rapat pimpinan yang dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
2	Memberikan arahan penyusunan kuesioner pengukuran Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Arahan penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layannya Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada keasdepan di lingkup Deputy bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Tingginya dinamika isu ekonomi strategis menyebabkan permintaan layanan koordinasi meningkat, baik dalam bentuk rapat koordinasi, fasilitasi penyelesaian hambatan, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Dokumentasi dan hasil koordinasi belum sepenuhnya seragam, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap tindak lanjut yang telah disepakati.
3. Belum meratanya tingkat kepuasan layanan di seluruh *stakeholder*, masih adanya keterlambatan dalam tindak lanjut hasil koordinasi, serta terbatasnya umpan balik dari pengguna layanan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya tindak lanjut, yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas perencanaan agenda koordinasi, memanfaatkan teknologi rapat daring dan kolaborasi digital, serta melakukan prioritasasi isu berdasarkan tingkat urgensi.
2. Menyusun standar dokumentasi hasil rapat koordinasi, mempercepat

distribusi risalah rapat, serta memastikan setiap rekomendasi dilengkapi penanggung jawab dan target penyelesaian.

3. Dillakukan survei kepuasan layanan secara berkala untuk memperoleh masukan dari pengguna layanan. Selain itu, dilakukan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi, penguatan kanal umpan balik melalui kuesioner digital dan forum diskusi, serta penyesuaian kebijakan secara adaptif dan responsif.

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1. Persentase Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada Peraturan Sekretaris Kementerian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 12 rencana aksi, sebagai berikut:

- Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) (1 kegiatan pada triwulan IV);
- Nilai SAKIP (2 kegiatan pada triwulan I, 1 kegiatan pada triwulan II, 1 kegiatan pada triwulan III, 2 kegiatan pada triwulan IV);
- Tingkat Digitalisasi Arsip (1 kegiatan pada masing-masing triwulan I-IV).

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

% Pelaksanaan Renaksi RB

$$= (\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan} : \text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 92%. Adapun target triwulan I 2026 adalah sebesar 92%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 27,27% atau mencapai 110% dari target triwulan I Tahun 2026 atau 29,64% dari target tahunan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	20%	27,27%	110%

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebesar 29,64% dari target 92% pada tahun 2026. Pemenuhan target menunjukkan Renaksi RB yang dilaksanakan telah memenuhi seluruh Renaksi RB yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi			Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026
			Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan melalui <i>coaching clinic</i> Lingkup

			Kedeputan III pembahasan penyusunan perjanjian kinerja pada tanggal 21 Januari 2026 dan penetapan dilaksanakan secara individu pada tanggal 6 Maret 2026.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-I 2026.
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Nota Dinas dan Sosialisasi SRIKANDI.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Pemahaman mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan RB General masih belum merata di seluruh unit kerja.
2. Integrasi data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih tersebar pada berbagai unit kerja, sehingga proses konsolidasi bukti dukung membutuhkan waktu yang relatif lama.
3. Terdapat keterbatasan data dukung awal karena belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I Taun 2026, maka disusun beberapa upaya tindak lanjut, yaitu :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada unit kerja mengenai implementasi Reformasi Birokrasi.
2. Membentuk tim kerja lintas unit untuk memperkuat koordinasi, menetapkan penanggung jawab pengelolaan data pada setiap unit kerja, serta melakukan standardisasi format dokumen pendukung.
3. Melakukan inventarisasi dan validasi data dukung sebagai dasar pelaksanaan.

Jakarta, April 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon